



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

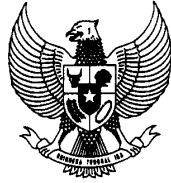
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;  
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018.

KESATU ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Legislasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rangka pengawasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2018

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER</b>						
1.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah	Sebagai pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemendagri</li> <li>• Pemerintah provinsi/kabupaten/kota</li> </ul>	2018	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Kepala Daerah
2.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif	Sebagai pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh Kemen PPPA dan Pemerintah Daerah	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemendagri, Pemerintah provinsi/kabupaten/kota</li> </ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luncuran tahun 2017</li> <li>• Masih dalam tahap penyusunan panduan</li> </ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Komisi Pemilihan Umum tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Perpanjangan kesepakatan bersama sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Juli 2015	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Komisi Pemilihan Umum	2018	Sudah dalam tahap pembahasan dengan pihak Komisi Pemilihan Umum
4.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilihan	Perpanjangan Nota Kesepahaman sebelumnya yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Juni 2018	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	Umum					
5.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Upaya pelebagaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kemen ESDM	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>
6.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan	Perpanjangan kesepakatan bersama sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Januari 2015	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kemenhub	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan dengan pihak Kementerian Perhubungan</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 25 Oktober 2013	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kemen Kominfo	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika</li></ul>
----	--	--	---	---------------	------	--

**DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

8.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi SDM P2TP2A tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunkan angka KDRT dan mengingatkan penanganan kepada korban</li><li>• Menerapkan layanan psikososial bagi para pendamping</li></ul>	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komnas Perempuan</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemenag</li><li>• Kejagung</li><li>• MA</li><li>• Advokat</li><li>• LPSK</li><li>• Polri</li><li>• Pengadilan Agama</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• P2TP2A DKI Jakarta</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>
----	---	---	--	---	------	---



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas PP dan KB DKI Jakarta</li></ul>		
9.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan Korban KDRT	Agar para Aparat Penegak Hukum (APH) peduli terhadap isu KDRT dan lebih responsif kepada korban KDRT	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komnas Perempuan</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemenag</li><li>• Kejagung</li><li>• MA</li><li>• Advokat</li><li>• LPSK</li><li>• Polri</li><li>• Pengadilan Agama</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• P2TP2A DKI Jakarta</li><li>• Dinas PP dan KB DKI Jakarta</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

10.	Peraturan Menteri PPPA tentang Strategi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender di Pengungsian	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial mengamanatkan untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan, memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan serta pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan di daerah konflik sosial termasuk di pengungsian	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Pemerintah provinsi/kabupaten/kota</li></ul>	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal
11.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Aparat Penegak Hukum tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Perpanjangan kesepakatan bersama yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 November 2015 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Mahkamah Agung</li><li>• Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan dengan para pihak terkait</li></ul>





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK						
12.	Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak	Amanat Pasal 71C ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• MA</li><li>• Kemen Setneg</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Kemenaker</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• Kemenpar</li><li>• Kemenkominfo</li><li>• Kemendagri</li><li>• Bappenas</li><li>• KPI</li><li>• BKKBN</li><li>• BNN</li><li>• LPSK</li><li>• BNP2TKI</li><li>• P2TP2A DKI Jakarta</li><li>• Yayasan Perlindungan Anak Cacat</li><li>• Pusat Kajian Perlindungan Anak UI</li><li>• Yayasan Kita dan</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

				Buah Hati		
13.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Amanat Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• MA</li><li>• Kemen Setneg</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• Kemekominfo</li><li>• Kemenag</li><li>• Kemendikbud</li><li>• LPSK</li><li>• Kementerian PPN/Bappenas</li><li>• Setkab</li><li>• Kemenlu</li><li>• KPAI</li><li>• Akademisi</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan oleh Panitia AntarKementerian</li><li>• Judul disepakati diubah menjadi: Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan dan Rehabilitasi bagi Pelaku Persetubuhan dan Pencabulan</li></ul>
14.	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	Amanat Pasal 73A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• MA</li><li>• KPAI</li><li>• Komnas PA</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenkes</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan oleh Panitia AntarKementerian</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

15.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Amanat Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Internal	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal
16.	Peraturan Menteri PPPA tentang NSPK Perlindungan Anak	Amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Sesdep Bidang Perlindungan Anak	Internal	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal

**DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK**

17.	Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Amanat Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li><li>• Mewujudkan negara Indonesia menjadi Indonesia Layak Anak di Tahun 2030</li><li>• Pengaturan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah, yang mencakup arah,</li></ul>	Sesdep Bidang Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota</li><li>• Bappenas</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemensos</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• Kemen PAN-RB</li><li>• Polri</li><li>• Kejaksaan Agung</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Kemenag</li><li>• Kemenkes</li><li>• Kemendikbud</li><li>• Kemen Kominfo</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan oleh Panitia AntarKementerian</li><li>• Sudah ada SK Menteri PPPA Nomor 72 Tahun 2016 tentang Panitia AntarKementerian/NonKementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak</li></ul>
-----	--	--	-----------------------------------	---	------	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

		sasaran, penyelenggaraan, pembinaan, dan pendanaan kebijakan		<ul style="list-style-type: none"><li>• KDPDTT</li><li>• Kemenaker</li><li>• Kemen PUPera</li><li>• Kemen Setneg</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemenpar</li><li>• KPAI</li><li>• KPI</li><li>• BKKPN</li><li>• BNN</li><li>• BPOM</li><li>• BNPB</li><li>• BPS</li><li>• Perpustakaan Nasional</li></ul>		
18.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum memiliki standar ruang bermain ramah anak</li><li>• Pertimbangan terkait sertifikasi</li><li>• Membangun tumbuh kembang anak yang optimal yang memiliki aspek sosial seperti taman/tempat bermain yang ramah bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Konvensi Hak Anak yang</li></ul>	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen PUPR</li><li>• Kemen LHK</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenhub</li><li>• Kemen ATR</li><li>• Bappenas</li><li>• Kemenkumham</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

		telah diratifikasi oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990				
19.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik bagi Fasilitator Anak	Harus ada kebijakan yang mengatur tentang kode etik bekerja dengan anak, karena selama ini jumlah anak yang bekerja terus meningkat dan belum ada kode etik yang mengatur tentang bagaimana fasilitator berinteraksi dengan anak	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas PPPA Provinsi dan Kab/Kota</li><li>• LSM</li></ul>	2018	Luncuran tahun 2017
20.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Fasilitator Anak	Dalam rangka meningkatkan partisipasi anak dalam program pembangunan perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga peran dan kontribusi fasilitator anak sangat diperlukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak-anak	Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas PPPA Provinsi dan Kab/Kota</li><li>• LSM</li></ul>	2018	Luncuran tahun 2017
21.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Puskesmas Ramah Anak mengalami peningkatan, untuk itu perlu dipertimbangkan adanya	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkes</li><li>• Kemenkumham</li><li>• BPOM</li><li>• Kemendagri</li></ul>	2018	Sedang dalam tahap kajian dan penyusunan konsepsi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

		standardisasi dalam pelaksanaan pelayanan ramah anak di Puskesmas				
22.	Revisi Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak	Perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan Sekolah Ramah Anak saat ini	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas, dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bappenas</li><li>• Kemendikbud</li><li>• Kemenag</li><li>• Kemenkumham</li></ul>	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal

**DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT**

23.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Media Komunitas di Daerah	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik mengamanatkan semua Menteri termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyebarluaskan kebijakan dan programnya termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak	Asisten Deputi Partisipasi Media	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Media Komunitas Daerah</li></ul>	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal
-----	---	---	----------------------------------	--	------	---



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**INSPEKTORAT**

INSPEKTORAT						
24.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kemen PPPA	Sebagai acuan dalam menindaklanjuti laporan pegawai dan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemen PPPA	Inspektorat	Internal Kemen PPPA	2018	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kemen PPPA
25.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan	Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan APIP sesuai dengan kode etik APIP dan standar audit APIP	Inspektorat	BPKP	2018	Sedang dalam tahap kajian dan penyusunan konsepsi
26.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemen PPPA	Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menyesuaikan dengan Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPK</li><li>• Kemen PANRB</li><li>• BPKP</li></ul>	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

		Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sehingga perlu diganti dengan peraturan menteri yang baru				
27.	Peraturan Menteri PPPA tentang SOP Pengawasan	Amanat Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inspektorat	Lintas Satker	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal
28.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Auditor	Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPKP</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemen PANRB</li></ul>	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

		keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan/atau organisasi (PermenPAN-PER/04/M.PAN/03/2008).				
29.	Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Road Map</i> Pengembangan Profesi Auditor	Sebagai cetak biru dalam rangka meningkatkan kapasitas auditor di Inspektorat	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPKP</li><li>• Kemenkeu</li></ul>	2018	Sedang dalam tahap kajian dan penyusunan konsepsi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**BIRO HUKUM DAN HUMAS**

BIRO HUKUM DAN HUMAS						
30.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA	Melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA, Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA, Keputusan Menteri Negara PPPA Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA, dan Keputusan Menteri Negara PPPA Nomor 93 Tahun 2012 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kemen PPPA	Biro Hukum dan Humas	Internal Kemen PPPA	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**BIRO UMUM DAN SDM**

BIRO UMUM DAN SDM						
31.	Instruksi Menteri PPPA tentang Percepatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal Kemen PPPA	2018	Sudah ditetapkan menjadi Instruksi Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA	Sebagai dasar untuk menghitung beban kerja	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal Kemen PPPA	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam fungsi manajerial</li><li>• Amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai dasar dalam</li></ul>	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	Internal Kemen PPPA	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

		penentuan standarisasi kompetensi jabatan bagi pemangku				
34.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Karena cuti masih dibayarkan penuh</li><li>• Sudah tidak relevannya peraturan pemberian tunjangan yang lama serta beberapa aturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini agar tercipta keadilan yang menuju sistem merit</li></ul>	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internal Kemen PPPA</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Kemensetneg</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan</li></ul>
35.	Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Grand Design</i> Pengembangan SDM Tahun 2014-2019	Untuk menghasilkan ASN yang bermutu dan profesional diperlukan rancangan besar secara menyeluruh terkait SDM dalam waktu tertentu	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen PANRB</li><li>• BKN</li><li>• Kemen Setneg</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>
36.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Karir PNS Kemen PPPA	Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemen PANRB</li><li>• BKN</li><li>• Kemen Setneg</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

37.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Pegawai Kemen PPPA	Sebagai dasar dalam penegakan hukum dan sebagai alat kontrol pegawai Kemen PPPA dalam bekerja khususnya dengan isu perempuan dan anak	Bagian Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sesmen PPPA</li><li>• Para Eselon I di Kemen PPPA</li><li>• Inspektur Kemen PPPA</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Sudah dalam tahap pembahasan</li></ul>
38.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal Kemen PPPA	2018	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
39.	Peraturan Menteri PPPA tentang Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Amanat Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal Kemen PPPA	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

**BIRO PERENCANAAN DAN DATA**

BIRO PERENCANAAN DAN DATA						
40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra Kemen PPPA Tahun 2015-2019	Perubahan struktur Kemen PPPA Tahun 2016	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Data	Internal Kemen PPPA	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>
41.	Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kemen PPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada standarisasi kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan teknologi informasi di Kemen PPPA sehingga perlu diatur dalam Peraturan Menteri</li><li>• Belum ada pengaturan terkait tata kelola Sistem Informasi Gender dan Anak</li></ul>	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkominfo</li><li>• BPS</li><li>• Kemendagri</li><li>• Kemenkumham</li><li>• Kemenkeu</li></ul>	2018	Sudah diundangkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pengelolaan Aplikasi Simfoni PPA	Belum ada dasar hukum sebagai petunjuk pengelolaan aplikasi pencatatan dan plaporan data kekerasan nasional	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	Kemen PPPA, Dinas PPPA, Lembaga layanan korban di tingkat provinsi dan kab/kota	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>
43.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Sistem Pencatatan	Kemen PPPA belum memiliki data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkominfo</li><li>• BPS</li><li>• Kemendagri</li></ul>	2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luncuran tahun 2017</li><li>• Masih dalam tahap penyusunan draft awal</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

	dan Pelaporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak Secara Nasional	terintegrasi secara nasional		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenkumham</li><li>• Kemenkeu</li></ul>		
44.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang PP dan PA kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dengan Asas Dekonsentrasi Tahun 2019	Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPK</li><li>• Kemenko Perekonomian</li><li>• Kemenko PMK</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Kemendagri</li><li>• Bappenas</li></ul>	2018	Sedang dalam tahap kajian dan penyusunan konsepsi
45.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Dukcapil Kemendagri dalam rangka pemanfaatan data kependudukan	Tindak lanjut Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan Kemendagri No.21A/MPPPA/12/2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas Kemen PPPA	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	Kemendagri	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

46.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Majelis Rakyat Papua tentang Pelembagaan PUG, PP, dan PA pada Masyarakat Papua	Menyesuaikan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	Bagian Kerjasama, Biro Perencanaan dan Data	Kemendagri	2018	Sudah dalam tahap pembahasan
47.	Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Iran dalam bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga	Analisis kebutuhan kerja sama antara Indonesia dengan Iran dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Bagian Kerjasama, Biro Perencanaan dan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenlu</li><li>• Kedutaan Iran</li><li>• Bappenas</li></ul>	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal
48.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan BPS dalam penyusunan buku Profil Perempuan Indonesia Tahun 2018	Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan BPS Nomor 1/MPP-PA/Dep.3/05/2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	BPS	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

49.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan BPS dalam penyusunan buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan Statistik Gender Tematik Tahun 2018	Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan BPS Nomor 1/MPP-PA/Dep.3/05/2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	BPS	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal
50.	Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan BPS dalam penyusunan buku Profil Anak Indonesia Tahun 2018	Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Kemen PPPA dengan BPS Nomor 1/MPP-PA/Dep.3/05/2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	BPS	2018	Masih dalam tahap penyusunan draft awal
51.	Keputusan Presiden tentang Keanggotaan ACWC	Analisis kebutuhan kerja sama antara Indonesia dengan Iran dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Bagian Kerjasama, Biro Perencanaan dan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenlu</li><li>• Kemensetneg</li><li>• Kemensetkab</li><li>• Kemenkeu</li><li>• Bappenas</li><li>• Kemenkumham</li></ul>	2018	Sudah dalam tahap pengesahan oleh Presiden



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

52.	Perpanjangan Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Fiji tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Analisis kebutuhan kerja sama antara Indonesia dengan Fiji dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Bagian Kerjasama, Biro Perencanaan dan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemenlu</li><li>• Kedutaan Fiji</li><li>• Bappenas</li><li>• Kemensos</li></ul>	2018	Sudah dalam tahap pembahasan
-----	--	---	---	---	------	------------------------------

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE